



TANTANGAN GUBERNUR DKI JAKARTA DALAM MEREALISASIKAN JANJI KAMPANYE

Aryojati Ardipandanto*)

Abstrak

Pasangan Anies Baswedan–Sandiaga Uno resmi menjadi Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Janji-janji pada masa kampanye dituntut untuk segera direalisasikan sesuai dengan harapan warga Jakarta. Tantangan yang dihadapi antara lain, harus menghadapi kebijakan pemerintah pusat dan menghadapi kinerja birokrasi yang sudah ada yang dipandang kurang public service oriented. Langkah awal yang perlu dilakukan Gubernur Anies adalah menggunakan strategi politik reinforcement, yaitu merombak birokrasi dan memberikan langkah tegas bagi penerapan kebijakan tertentu. Hal-hal yang perlu segera dilakukan adalah menerapkan kebijakan yang bersifat win-win solution, berkonsolidasi tidak hanya dengan aparat pemerintah tetapi juga dengan elemen masyarakat, dan mengaktifkan kembali forum kerukunan umat beragama agar proses realisasi janji-janji Gubernur Anies dapat berjalan lebih lancar.

Pendahuluan

Pada 16 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandi) memenangkan Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 - yang pemungutan suaranya diselenggarakan pada 19 April 2017 - mengalahkan pasangan Ahok-Djarot.

Dalam kampanyenya pada masa-masa Pilkada Gubernur DKI 2017, program-program yang dikemukakan oleh pasangan Anies Sandi antara lain 4 program prioritas, yaitu pertama,

program *One Kecamatan One Center for Entrepreneurship* (OK OCE). Kedua, Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus). Ketiga, Kartu Jakarta Sehat Plus (KJS Plus). Dan keempat, rumah dengan uang muka nol rupiah.

Janji-janji lain yang disampaikan pada saat kampanye oleh pasangan Anies-Sandi yaitu menghentikan reklamasi. Sejak awal Anies-Sandi mengambil posisi menentang Reklamasi Teluk Jakarta. Mereka berjanji menghentikan proyek yang sudah dicanangkan sejak era Presiden Soeharto itu untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta

*) Peneliti Muda Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: aroyjati.ardipandanto@gmail.com



perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir, dan segenap warga Jakarta.

Pasangan Anies-Sandi juga berjanji akan mengadakan layanan transportasi terintegrasi. Dan yang cukup mengemuka adalah program untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dengan menjaga ketersediaan bahan baku dan menyederhanakan rantai distribusi, serta menyediakan Kartu Pangan Jakarta untuk meningkatkan daya beli warga tidak mampu. Program kerja Anies-Sandi ini juga akan melibatkan revitalisasi pasar tradisional dan pedagang kali lima.

Selain itu, dijanjikan pula program transportasi murah, aman, dan nyaman untuk seluruh warga Jakarta. Dengan program ini, Anies-Sandi menjanjikan integrasi antara bus TransJakarta dengan angkutan umum di bawah Koperasi Wahana Kalpika (KWK). Prinsipnya adalah dengan membangun sarana transportasi yang terjangkau untuk seluruh warga Jakarta.

Janji kampanye yang lain adalah bahwa semua yang melanggar hukum seperti perjudian, prostitusi, perdagangan orang atau peredaran narkoba dan fasilitas yang tidak sesuai peruntukan akan ditindak tegas. Pasangan Anies-Sandi berjanji akan menindak itu semua tanpa pandang bulu.

Hal yang tidak kalah penting adalah bahwa sejak awal kampanye, Pasangan Anies-Sandi selalu menjanjikan tidak akan melakukan pengusuran dalam menata Kota Jakarta. Menurut mereka, pengusuran adalah tidak manusiawi dan hanya membuat warga Jakarta menderita. Anies dan Sandi mengatakan akan melakukan program penataan kembali, bukan pengusuran.

Peringatan dan sorotan dari berbagai kalangan masyarakat yang menuntut implementasi janji-janji kampanye tentunya menjadi tantangan bagi Gubernur DKI Jakarta yang baru ini untuk mengatur strategi bagaimana merealisasikan janji-janji kampanye tersebut menjadi program-program yang terwujud nyata. Tulisan ini mengemukakan tantangan yang dihadapi oleh Gubernur DKI dalam mewujudkan visi-misi kampanyenya selama ini.

Tantangan dan Langkah Awal Gubernur DKI Jakarta

Pesimistis terhadap terealisasinya janji Gubernur DKI Jakarta mengemuka dari berbagai kalangan masyarakat. Contohnya, terkait rencana penghentian reklamasi Teluk

Jakarta, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengatakan bahwa janji tersebut adalah yang paling sulit diwujudkan, karena pemerintah pusat telah mencabut moratorium proyek reklamasi itu. Jadi, perlu ada kearifan antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat dalam mendiskusikan masalah ini, karena dampak penolakan reklamasi bisa menimbulkan efek yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga internasional.

Selanjutnya ada juga pandangan yang lebih “agresif”, yaitu yang menyebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta harus berani merealisasikan penolakan reklamasi Teluk Jakarta, karena ada langkah-langkah yang memang memungkinkan. Deputi Advokasi, Hukum, dan Kebijakan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Tigor Hutapea berpendapat bahwa langkah yang dapat dilakukan Gubernur Anies untuk menghentikan reklamasi adalah dengan mengabaikan pemerintah pusat untuk memberikan izin. Dasar aturannya yang kuat adalah Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pasal 4 menyebutkan bahwa wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tindakan ini yang akan menegaskan *political will* untuk menghentikan reklamasi.

Di pihak lain, Wakil Ketua *Setara Institute*, Bonar Tigor Naipospos memprediksi bahwa tak lama setelah Anies-Sandi menjadi gubernur definitif, akan muncul tuntutan dari kelompok ekstrem soal pelarangan alkohol atau tempat hiburan. Padahal gaya hidup metropolitan, terutama tempat hiburan di Jakarta yang multikultural, menjadi motor ekonomi. Nanti akan terlihat apakah Anies-Sandi mampu menghadapi tuntutan seperti itu, dan akan terlihat bagaimana mereka mencari jalan tengah antara tuntutan kelompok yang bagi sebagian orang dipandang sebagai kelompok beraliran “ekstrem” dengan kehidupan Jakarta yang multikultural, modern, dan metropolitan.

Selanjutnya, pengamat politik dari Universitas Indonesia Rezza Haryadi berpendapat bahwa sejumlah janji Anies-Sandi akan sulit dilaksanakan karena akan menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah Anies-Sandi akan berhadapan dengan pemerintah pusat. Tantangan kedua, Anies-Sandi akan kesulitan mencari sumber pendanaan. Tantangan ketiga, Anies-Sandi akan terbentur pada regulasi yang sudah ada maupun birokrasi yang berbelit-belit.

Dalam hal janji rumah DP 0%, persoalannya adalah bahwa membangun rumah dan kemudian menjualnya dengan DP 0% di Jakarta sangat tidak logis. Harga tanah di Jakarta sudah belasan juta rupiah. Biaya bangunan per meter persegi pun sudah di atas Rp2 juta. Oleh karena itu, Anies akan kesulitan mencari pemodal untuk membiayai program ini.

Kemudian, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah terkait keberanian untuk menutup tempat-tempat prostitusi, menutup perjudian, dan hal-hal ilegal lainnya yang selama ini sulit “tersentuh” oleh hukum. Salah satunya adalah janji untuk menutup Hotel Alexis yang selama ini disinyalir menjadi tempat prostitusi terselubung. Pemda DKI Jakarta selama ini nyaris tidak punya alasan untuk menutup tempat hiburan malam. Tidak hanya Alexis, beberapa tempat hiburan malam lain yang ditengarai melakukan penyimpangan izin juga sulit untuk ditutup dikarenakan minimnya bukti.

Beberapa langkah awal dilakukan Gubernur DKI Jakarta untuk menghadapi tantangan-tantangan di atas. Seusai dilantik Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno menjalankan komitmen mewujudkan *good clean and strong government*. Salah satu langkahnya adalah mengganti seluruh Komisaris dan Direksi BUMD DKI. Hal ini berdasarkan *track record* kinerja dan LHP BPK, di mana tercatat tidak profesional secara *entrepreneurship* dan terlalu mengedepankan profit *oriented business management*. Jadi, tampaknya, demi kelancaran dan keberlangsungan realisasi janji kampanye serta visi misi Gubernur Anies-Wagub Sandi, sebelum melangkah jauh, dipandang akan lebih baik jika melakukan pembenahan dan pembersihan di lingkungan BUMD dengan mengganti seluruh Komisaris-Direksi.

Gubernur Anies juga tampak bergerak cepat dalam membangun komunikasi dengan semua tingkatan birokrasi di Pemerintah Daerah DKI Jakarta, sesuai dengan konsep dalam 100 hari pertama kerja Gubernur DKI Jakarta, yaitu agar dapat tercipta sebuah etos kerja yang positif dan saling menghargai.

Selanjutnya, langkah cepat Gubernur Anies dalam memenuhi salah satu janji kampanyenya adalah menutup Hotel Alexis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mengambil langkah tegas melakukan penutupan terhadap hotel dan griya pijat Alexis, Jakarta Utara. Melalui surat resmi yang

ditujukan kepada Direktur PT. Grand Ancol Hotel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemprov DKI Jakarta menyatakan tidak bisa memproses surat permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang diajukan Hotel Alexis.

Melihat beberapa langkah yang dilakukan Gubernur Anies di atas, dari perspektif strategi politik, yang dilakukan adalah strategi politik penguatan (*reinforcement strategy*). Dalam Ilmu Politik, strategi ini dapat dilakukan oleh kandidat yang telah dipilih dengan cara membuktikan janji-janji politiknya pada saat kampanye. Menurut Schroder (2003), strategi penguatan bisa dilakukan dalam bentuk formulasi dan implementasi kebijakan pro-publik untuk menguatkan *image* pemimpin politik. Hal-hal yang dikuatkan oleh Gubernur Anies adalah pondasi birokrasi dan penguatan komitmen pada ketegasan mengambil kebijakan terkait hal-hal yang sedikit banyak diragukan oleh sebagian publik. Penutupan Hotel Alexis adalah salah satu contohnya. Ini merupakan penguatan sinyal bahwa Gubernur Anies berani melakukan tindakan tegas dan memberikan tanda bahwa hal-hal yang sama ke depannya akan berani dilakukan terhadap tempat-tempat yang melakukan usaha ilegal semacam itu. Langkah awal strategi politik penguatan ini setidaknya akan memberikan efek *shock therapy* terhadap sebagian kalangan yang meragukan ketegasan Gubernur Anies dalam merealisasikan janji-janjinya.

Penutup

Langkah awal yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan adalah melakukan reformasi atau restrukturisasi dalam tubuh birokrasi tertentu yang selama ini dianggap kurang fokus pada *public service oriented*. Di sini dapat dilihat bahwa Gubernur Anies melakukan langkah membangun pondasi bagi upaya mewujudkan janji-janji kampanyenya. Hal ini merupakan strategi politik yang bersifat penguatan (*reinforcement strategy*) yang juga bersifat *shock therapy* bagi sebagian kalangan yang meragukan ketegasan Gubernur Anies dalam mengambil suatu kebijakan.

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain, terkait tantangan dalam mewujudkan janji menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta, tampaknya sebaiknya Gubernur Anies memperhatikan masukan-masukan terkait perlunya melakukan kebijakan yang bersifat *win-win solution*, yaitu yang

mengakomodasi kepentingan investor dan juga kepentingan nelayan. Lahan yang telah terbangun bisa saja sebagian diperuntukkan bagi nelayan, di mana bentuknya bisa berupa perkampungan, yang di dalamnya berisi sejumlah fasilitas untuk nelayan, misalnya rumah susun, sekolah, dan rumah sakit.

Berkaitan dengan upaya membangun pondasi yang kuat dari sisi aparatur pemerintah dan dari elemen masyarakat, sebaiknya selain berkonsolidasi dengan seluruh jajaran aparatur pemerintah DKI Jakarta, Gubernur Anies juga harus melakukan rekonsiliasi dengan berbagai golongan warga DKI Jakarta pasca-Pilkada 2017, untuk memastikan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang kondusif. Tindakan konkret yang harus segera diintensifkan adalah melakukan silaturahmi dengan seluruh eks pemimpin DKI Jakarta bersama dengan para wakilnya saat itu, serta perwakilan *stakeholders* dan pimpinan partai politik.

Gubernur Anies juga harus segera membentuk sebuah forum khusus yang berisikan para mantan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yang nantinya difungsikan sebagai wadah komunikasi yang berkelanjutan. Selain itu, Gubernur Anies juga perlu segera mengaktifkan kembali forum kerukunan umat beragama yang pernah ada di DKI Jakarta. Hal ini penting untuk menetralisasi isu-isu dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta yang sedikit-banyak oleh pihak-pihak tertentu dikaitkan dengan masalah SARA.

Referensi

- Schroder, Peter. (2003). *Strategi Politik*, Jakarta: Frederich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit.
- “Apakah Anies Berani Menutup Alexis”, <https://tirto.id/apakah-anies-berani-menutup-alexis-cyqL> : diakses 6 November 2017.
- “Gubernur Anies Resmi Tutup Alexis”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171030131530-20-252144/gubernur-anies-resmi-tutup-alexis/>, diakses 1 November 2017.
- “Hentikan Reklamasi: Gubernur Anies dapat Lakukan Dua Hal Ini”, <https://news.detik.com/berita/3687106/hentikan-reklamasi-gubernur-anies-dapat-lakukan-dua-langkah-ini>, diakses 1 November 2017.
- “Ini 4 Janji Kampanye Anies-Sandi yang Sulit Terlaksana”, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/10/10/ini-4-janji-kampanye-anies-sandi-yang-sulit-terlaksana-apa-saja?page=4>, diakses 6 November 2017.
- “Pasca Dilantik, Ini Langkah Awal Gubernur DKI Jakarta Anies-Sandi”, <https://nusantaranews.co/pasca-dilantik-ini-langkah-awal-gubernur-dki-jakarta-anies-sandi/>, diakses 1 November 2017.
- “Sandi Janji Semua Tempat Prostitusi akan Ditutup”, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/07/19/otbjkx-sandi-janji-semua-tempat-prostitusi-akan-ditutup>, diakses 6 November 2017.
- “Seperti Apa Perubahan Jakarta di bawah Anies Baswedan?”, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39639485>, diakses 2 November 2017.
- “Sutiyoso Ungkap Janji Kampanye Anies-Sandi yang Paling Sulit Terlaksana”, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/10/17/sutiyoso-ungkap-janji-kampanye-anies-sandi-yang-paling-sulit-terlaksana?page=2>, diakses 6 November 2017.